

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk menaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.²

Rencana pembangunan ekonomi telah dibuat pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan taraf hidup masyarakat.³ Berdasarkan UU No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, terdapat strategi pokok pembangunan pembangunan Indonesia. Tujuan utama strategi pembangunan Indonesia adalah mewujudkan hak-hak dasar masyarakat dan membangun landasan pembangunan yang kokoh.⁴ Hak-hak dasar masyarakat adalah kebebasan dari

² Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi* (Makasar: CV SAH MEDIA, 2019).

³ Fadhlurrahman Ruslan and Nirdukita Ratnawati, ‘Peran Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Per Kapita : Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia’, 32.1 (2024), pp. 11–22.

⁴ UU RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan dan ketakutan, serta kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat, yang realisasinya merupakan prioritas.⁵ Meskipun hak-hak dasar tersebut secara jelas tertuang dalam konstitusi, namun sejauh ini hak-hak tersebut diabaikan dan hanya menjadi tujuan sekunder dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dalam melaksanakan rencana program pembangunan perlu ditetapkan agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan yang dicapai dari program ini antara lain adalah terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam juga peningkatan infrastruktur.⁶ Penetapan rancangan yang telah tertuang dalam konstitusi untuk mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan mengurangi tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu upaya strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

⁵ Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

⁶ Akbar Sis Putro and Achma Hendra Setiawan, ‘Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010’, *Diponegoro Journal of Economics*, 2.3 (2013), pp. 1–14 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>>.

masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁷ Langkah ini dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang kerja. Selain itu, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan digitalisasi membantu menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah pedesaan.⁸ Pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi domestik dan asing, yang pada gilirannya membuka lebih banyak peluang kerja. Tidak kalah penting, penyediaan pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dan kompetitif. Dengan langkah-langkah tersebut, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi pilar utama yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.⁹

Pengangguran merupakan Indikator pembangunan ekonomi dalam sebuah Negara. Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap Negara, pengangguran menyebabkan berkurangnya tingkat pendapatan perkapita sehingga menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial dalam suatu negara. Terjadinya

⁷ Muhammad Syarif, ‘Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7.2 (2017), pp. 1–12.

⁸ Azhari Azhari, Kamaruddin Kamaruddin, and Mai Simahatie, ‘Strategi Penciptaan Lapangan Kerja Pada Sektor Umkm Di Indonesia’, *Jurnal Ekonomika*, 16.1 (2024), pp. 19–25, doi:10.51179/eko.v16i1.2655.

⁹ Maulida Indriani, ‘Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal’, *Gema Keadilan*, Vol. 3, No (2016), p. Pp. 74-85 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>>.

pengangguran merupakan akibat dari tingginya tingkat angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.¹⁰ Pemerintah memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai masalah dalam suatu Negara, termasuk masalah dalam pembangunan ekonomi, Pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Masalah pengangguran adalah salah satu masalah yang cukup serius bagi negara berkembang seperti Negara Indonesia.¹² Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GDP dan pendapatan per kapita suatu wilayah.¹³ Pengangguran di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun Pulau Jawa menjadi wilayah dengan pengangguran terbanyak, hal ini terjadi karena persebaran penduduk yang tidak merata dan mayoritas penduduk Indonesia berada di Pulau

¹⁰ Sis Putro and Hendra Setiawan, ‘Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010’.

¹¹ R Didi Djadjuli, ‘Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah’, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.2 (2018), pp. 8–21 <<https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156>>.

¹² Dwi Mahroji and Iin Nurkhasanah, ‘Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten’, *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9.1 (2019), doi:10.35448/jequ.v9i1.5436.

¹³ Sis Putro and Hendra Setiawan, ‘Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010’.

Jawa.¹⁴ Ketidakmerataan penduduk Indonesia terjadi karena kesenjangan perekonomian antar wilayah, dimana Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian Indonesia sehingga banyak masyarakat yang berasal dari daerah lain pergi ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Dari sisi sosial maupun ekonomi, kesenjangan merupakan salah satu gejala negatif dari pembangunan yang tidak merata.¹⁵ Pulau Jawa sendiri terbagi menjadi 6 Provinsi yang salah satunya yakni Provinsi Banten. Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka tahun 2019-2023 di Pulau Jawa, Provinsi Banten menjadi yang tertinggi dibanding Provinsi lainnya. Berikut disajikan tabel mengenai tingkat pengangguran terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2023.

Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2023

Pada gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa berfluktuatif meskipun cenderung menurun dari tahun 2019-

¹⁴ Ida Bagoes Mantra, ‘Profil Penduduk Indonesia’, *International Journal of Applied Engineering Research*, 12.16 (2015), pp. 6182–91 <<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2012.pdf>>.

¹⁵ Zhilal Ilvadea Violin and M. Yudhi Lutfi, ‘Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2010- 2019’, *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2.1 (2022), pp. 227–52, doi:10.25105/jet.v2i1.14740.

2023 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, hal ini menjadi perhatian mengingat Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Apabila penyerapan tenaga kerja rendah maka tingkat pengangguran terbuka akan naik dan akan mengganggu kondisi ekonomi di Provinsi Banten.

Permasalahan yang dihadapi provinsi Banten adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Dari Kabupaten/Kota di Banten, Kabupaten Serang menjadi kantong pengangguran terbesar. Selain Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang juga menjadi yang tertinggi di Banten.¹⁶ Sementara itu, dilihat dari sektor usaha, hanya dua sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yakni industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Dua sektor tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 2,25 juta atau 40% dari total angkatan kerja per akhir Februari 2023.¹⁷ Tingginya pengangguran di Banten menjadi ironi karena wilayah tersebut memiliki banyak kawasan industri. Setidaknya ada delapan kawasan industri khusus yang berdiri dan berkembang di provinsi tersebut.¹⁸

Pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pada jumlah lapangan pekerjaan, hal ini dipicu

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS), 2023

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, ‘Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Februari 2023’, 2023, pp. 1–45.

¹⁸ *Ibid.*

oleh banyaknya relokasi pabrik ke daerah lain untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah karena upah yang ditetapkan di provinsi banten dianggap tinggi dan terus naik. Pada tahun 2021, setidaknya ada tiga pabrik besar di Banten dengan serapan tenaga kerja hingga puluhan ribu pekerja memilih merelokasi bisnisnya ke Jawa Tengah, diantaranya: PT Nikomas, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI). Jawa Tengah menjadi pilihan para pabrik besar ini karena perbedaan upah tenaga kerja yang jauh lebih murah dibanding Banten.¹⁹ Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten pada 2023 sebesar Rp 2.661.280, sedangkan UMP Jawa Tengah hanya Rp 1.986.670.²⁰ Relokasi ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan diikuti dengan semakin rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga turut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Banten. Pada periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi di provinsi banten cenderung stagnan.²¹ Pertumbuhan ekonomi yang lambat berdampak langsung pada peningkatan pengangguran karena berkurangnya aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, investasi di sektor industri, perdagangan, dan jasa cenderung menurun, sehingga perusahaan tidak memperluas usahanya atau bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja.²²

¹⁹ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten. (2021). *Relokasi Pabrik di Serang*.

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS), 2023

²¹ *Ibid*

²² Siti Komariyah, Halimatus Putriya, and R. Alamsyah Sutantio, ‘Dampak Investasi, Kinerja Ekspor, Dan Inflasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia: Analisis Data Panel’, *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3.4 (2020), pp. 464–83, doi:10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4195.

Permasalahan pengangguran di Banten tentunya memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi masyarakat. Salah satu dampak yang terlihat adalah meningkatnya angka kemiskinan.²³ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2023, persentase penduduk miskin di Banten mencapai 6,17 persen.²⁴ Selain itu, pengangguran juga berdampak buruk pada sektor pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali menghadapi hambatan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.²⁵ Dampak lainnya adalah meningkatnya tindakan kriminalitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7392 kasus kriminalitas.²⁶ Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga keamanan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten.

Faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran terbuka yaitu upah minimum. Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 UU No 13 Tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

²³ Dini Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, ‘Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam’, *Tirtayasa Ekonomika*, 18.1 (2023), p. 123, doi:10.35448/jte.v18i1.13613.

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS), 2023

²⁵ Ema Dwi Aryanti and Agung Slamet Sukardi, ‘Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia’, *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4.2 (2024), pp. 117–33.

²⁶ BPS, *op. cit.*

kerja, kesepakatan atau perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁷ Berdasarkan teori penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja, kenaikan upah minimum dapat mengurangi permintaan tenaga kerja karena biaya yang lebih tinggi membuat perusahaan enggan merekrut pekerja. Sementara itu, lebih banyak orang tertarik bekerja dengan upah lebih tinggi, menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang berujung pada peningkatan pengangguran.²⁸

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk. Penduduk adalah setiap orang yang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu Negara dalam kurun waktu yang cukup lama.²⁹ Menurut teori Malthusian, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat melampaui kapasitas sumber daya ekonomi untuk menyediakan pekerjaan dan kebutuhan dasar. Jika populasi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat karena tidak semua individu dapat terserap dalam pasar kerja.³⁰

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia mengukur capaian

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Angka 30. Peraturan BPK.

²⁸ Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning. Hal. 359

²⁹ Aritonang Romaito and others, ‘Studi Kajian Pertumbuhan Penduduk Kab Deli Serdang’, *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1.4 (2023), pp. 245–52.

³⁰ Malthus, T. R. (1798). *An essay on the principle of population*. J. Johnson.

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam indeks pembangunan manusia terdapat dimensi yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.³¹ Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan pengetahuan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan terjadi penurunan pada tingkat pengangguran.³²

Penelitian terdahulu mengenai tingkat pengangguran terbuka dilakukan Alferdo, variabel upah minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran yang ada di Kota Manado begitu juga dengan indeks pembangunan manusia.³³ Di sisi lain, Baihawafi menemukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.³⁴ Selanjutnya Herniawati mengkaji pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat

³¹ Latif Arafat, Wiwiek Rindayati, and Sahara, ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah’, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7.2 (2020), pp. 140–58, doi:10.29244/jekp.7.2.2018.140-158.

³² Paul M. Romer, ‘Endogenous Technological Change’, *Journal of Political Economy*, 98.5 (1990), pp. S71–102, doi:10.3386/w3210.

³³ Alfredo Mahihody, Daisy Engka, and Antonius Luntungan, ‘Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipma) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.03 (2018), pp. 24–34.

³⁴ Muhammad Baihawafi and Asnita Frida Sebayang, ‘Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka’, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, pp. 39–44, doi:10.29313/jrieb.v3i1.1911.

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.³⁵ Sementara itu Lina meneliti pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.³⁶

Pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Banten yang tinggi merupakan masalah kompleks berkaitan dengan indikator tingkat upah minimum yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, jumlah penduduk yang mempengaruhi ketersediaan dan kecukupan lapangan kerja terhadap pekerja dan Indeks pembangunan manusia yang mempengaruhi kualitas pekerja itu sendiri. Ketiga faktor ini berkaitan erat dengan pengangguran terbuka. Upaya untuk menstabilkan dan menyesuaikan tingkat upah minimum, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia menjadi penting agar dapat mengurangi tingkat pengangguran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

³⁵ Herniwati Retno Handayani, ‘Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah’, *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (2019), pp. 159–69, doi:10.37676/ekombis.v10i2.2144.

³⁶ Lina Marliana, ‘Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia’, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6.1 (2022), p. 87, doi:10.33087/ekonomis.v6i1.490.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian terkait “Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2019-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi karena sebagian besar masyarakat bergantung pada pabrik sebagai lapangan pekerjaan, sehingga ketika banyaknya pabrik besar yang merelokasi tempat maka sebagian besar pekerja menjadi menganggur. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga turut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Banten. Pada periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi di provinsi banten cenderung stagnan, hal ini berdampak langsung pada peningkatan pengangguran karena berkurangnya aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah terdapat salah satu di antara tingkat upah minimum, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi banten 2019-2023?

2. Apakah tingkat upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2019-2023?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten 2019-2023?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh signifikan antara tingkat upah minimum, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menunjukkan adanya hubungan dan seberapa besar pengaruh tingkat upah minimum, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten periode 2019-2023.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

b. Bagi Lembaga

Dengan melakukan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai pengaruh tingkat upah minimum, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran. Hasil analisa penelitian ketiga variabel tersebut dapat digunakan oleh kementerian ketenagakerjaan sebagai salah satu acuan mengenai langkah yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembandingan dan pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh tingkat upah minimum, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dengan Periode mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Pengangguran terbuka (Y) sebagai variabel dependen (variabel terikat). Tingkat upah minimum (Indeks X1), jumlah penduduk (Indeks X2) dan indeks pembangunan manusia (Indeks X3) sebagai variabel independen (variabel bebas).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini difokuskan pada pengukuran pengaruh antara variabel tingkat upah minimum, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten periode tahun 2019-2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengangguran terbuka

Menurut Mankiw pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan.³⁷ Pengangangguran terbuka merupakan jenis pengangguran yang diklasifikasikan berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka terjadi karena jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Sebagai akibatnya semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Dalam jangka panjang efek yang ditimbulkan yaitu menjadikan tenaga kerja tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi sejumlah tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh sebab itu mereka dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka juga terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.³⁸

³⁷ Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 197-198

³⁸ Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro, (Jakarta: Raja Grafindo), 1994, hal. 56

b. Tingkat Upah Minimum

Menurut Soedarjadi, upah minimum adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 31 pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha sebagai bentuk imbalan kepada pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai balas jasa untuk pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan Upah minimum adalah upah terendah per jam , harian, atau bulanan yang dapat diterima oleh seorang pekerja atau buruh.⁴⁰

c. Jumlah Penduduk

Menurut Kartomo Wirosuhardjo Penduduk ialah sejumlah orang yang mendiami sebuah wilayah tertentu, disebut penduduk terlepas dari status warga negara. Sedangkan Menurut P.N.H. Simanjuntak Penduduk merupakan sekumpulan orang yang menempati sebuah wilaya sebagai

³⁹ Soedarjadi, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi (Cet ke-5: Jakarta: Rja Grafindo, 2008) hal. 75

⁴⁰ Ni Putu Decy Arwini, ‘Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 3.1 (2020), pp. 52–59, doi:10.47532/jiv.v3i1.100.

tempat tinggal yang berdomisili di suatu negara.⁴¹ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁴² Sedangkan penduduk menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.⁴³ Penduduk dapat mengalami fertilitas yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk atau mortalitas yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk. Jika fertilitas lebih besar dari mortalitas maka akan terjadi pertambahan jumlah penduduk sebaliknya, jika mortalitas lebih besar dari fertilitas maka akan terjadi berkurangnya jumlah penduduk.⁴⁴

d. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Saputra, Indeks Pembangunan Manusia adalah angka yang mengukur kinerja pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen fundamental kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang. Sebagai ukuran kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat

⁴¹ Tahar Rachman, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Migrasi Penduduk Jawa Akibat Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, pp. 10–27.

⁴² Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2023

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 2.

⁴⁴ Hidayatul Ainy, Siti Nurrochmah, and Septa Katmawanti, ‘Indikator Fertilitas, Seperti Crude Birth Rate (CBR), Total F’, *Preventia : The Indonesian Journal of Public Health*, 4.1 (2019), p. 15.

produktivitas seseorang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) Indonesia, indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia ada tiga, yaitu dengan *Longevity* variabel angka harapan hidup, *Educational Achievement* pengalaman pendidikan dan *Access to resource* diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* kemampuan daya beli.⁴⁵

2. Definisi Operasional

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran yang sama sekali tidak dalam status bekerja ataupun dalam proses berusaha menemukan peluang untuk dapat bekerja atau yang disebut dengan pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka menggunakan rumus sebagai berikut:⁴⁶

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

⁴⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2023

⁴⁶ *ibid*

b. Tingkat Upah Minimum

Tingkat upah minimum diukur dari penetapan upah minimum yang dilakukan setiap tahun didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:⁴⁷

$$Umn = UMt + \{UMt \times (Inflasi + \% \Delta PDBt)\}$$

UMn = Upah minimum yang akan ditetapkan

UMt = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari september tahun yang lalu sampai dengan priode september tahun berjalan

$\Delta PDBt$ = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan peride kwartal I dan II tahun berjalan.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk diukur berdasarkan data sensus yang dilakukan oleh badan pusat statistik yang dilakukan setiap sepuluh tahun.⁴⁸ Kemudian

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan, BAB V, Pasal 43-45.

⁴⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2023

data yang diperoleh diukur dengan angka kelahiran, angka kematian dan migrasi

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia diukur melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.⁴⁹ Rumus umum untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:⁵⁰

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{daya\ beli}} \times 100$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

⁴⁹ Mahroji and Nurkhasanah, ‘Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten’.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2023

2. Bagian utama terdiri dari

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah secara definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai kajian teori yang berisi penjelasan dari Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2019-2023, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, variabel, skala pengukuran dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas secara singkat tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis regresi, dan temuan penelitian terkait Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2019-2023.

Bab V : Pembahasan

Bab ini membahas secara luas dan lengkap mengenai Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2019-2023.

Bab VI : Kesimpulan

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil hasil penelitian tentang Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2019-2023 dan saran dari penulis.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.